

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA MENTERI SARMIDI MANGUNSARKORO (1949-1950)

EDUCATIONAL POLICY IN INDONESIA DURING MINISTER SARMIDI MANGUNSARKORO ERA (1949- 1950)

Oleh: Chairunisa dan Dr. Zulkarnain, M.Pd

ichachairun3@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan-kebijakan Sarmidi Mangunsarkoro pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum banyak diketahui publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan; (2) Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Sarmidi Mangunsarkoro pada tahun 1949-1950; (3) Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Sarmidi Mangunsarkoro pada tahun 1949-1950. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo dengan tahapan sebagai berikut: Pertama menentukan topik penelitian, kedua pengumpulan sumber baik berupa sumber primer ataupun sekunder, ketiga verifikasi atau kritik sumber, keempat interpretasi, dan terakhir historiografi atau penulisan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan lebih di fokuskan pada pembangunan pendidikan dengan meletakkan pondasi berupa penentuan dasar pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum dan penentuan sistem persekolahan; (2) Kebijakan yang dikeluarkan Sarmidi Mangunsarkoro tidak hanya mengeluarkan produk hukum berupa undang-undang pendidikan nasional tahun 1950 tetapi ada produk hukum lainnya seperti program Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus lanjutan PBH, dan kalender pendidikan; (3) Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sarmidi Mangunsarkoro berdampak disegala sektor kehidupan seperti sosial budaya, ekonomi, politik dan pendidikan.

Kata Kunci: Sarmidi Mangunsarkoro, Pendidikan, Kebijakan

ABSTRAC

Abstract

Sarmidi Mangunsarkoro's policies as Minister of Education, Teaching, and Culture had not been known well by the public. This study aimed to reveal: (1) Education in Indonesia in the early Independence era; (2) Educational Policies issued by Sarmidi Mangunsarkoro in 1949- 1950; (3) The effect of the policies issued by Sarmidi Mangunsarkoro in 1949- 1950. The present study employed historical research method following Kuntowijoyo with the steps performed as follow: The first step was determining the research topic, the second step was collecting sources, both primary and secondary sources, the third step was verification or source critics, the fourth step was interpretation, and the last step was historiograph or writing. The result of the study showed that: (1) Education in Indonesia during post-independence was more focused on building education by establishing foundation in the form of determining educational basis, educational purpose, curriculum, and schooling system; (2) Sarmidi Mangunsarkoro did not only issued legal products in the form of Law on National Education of 1950 but also other legal products such as Illiterate Eradication (PBH), PBH Advanced Course, and Education Calendar; (3) Sarmidi Mangunsarkoro's policies affected on various sector such as social culture, economy, politics, and education.

Keywords: *Sarmidi Mangunsarkoro, Education, Policy*

I. Pendahuluan

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan sudah ada sejak zaman pra-aksara dan terus berlanjut hingga saat ini. Pada masa pra-aksara pelaksanaan pendidikan masih sangat sederhana dan berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan tersebut berupa ilmu mencari, mengelola dan mengolah makanan. Pada masa kerajaan di Indonesia baik itu kerajaan Hindu, Buddha dan Islam pendidikan disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut dan pendidikan masa ini juga masih sangat tradisional.¹ Sedangkan pada masa penjajahan pendidikan di Indonesia diisi dengan kepentingan penjajah seperti pengajaran baca tulis untuk pemenuhan pegawai di pemerintahan. Perbedaan tujuan pendidikan pada setiap zaman menunjukkan bahwa kebutuhan setiap masa adalah berbeda.²

Sampai pada awal tahun 1950 tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri, 1 Maret 1946, yaitu warganegara sejati yang menyumbangkan

tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila, seperti yang terumuskan dalam UUD 1945.³ Baru pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 5 April diundangkan undang-undang Nomor 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia (Mr. Asaat) dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Sarmidi Mangunsarkoro).⁴

Sebagai Menteri peranan Sarmidi Mangunsarkoro dalam dunia pendidikan terbilang cukup besar. Tulisannya mengenai pendidikan banyak dimuat dimajalah Poesara yang dimiliki oleh Taman Siswa. Ia juga mendirikan Taman Siswa Jakarta yang pertama dan sampai sekarang masih ada. Pada tahun 1930-1928 Sarmidi pernah menjadi Anggota Pengurus Besar Kependuan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kependuan Nasional yang bebas dari pengaruh penjajah dan memupuk rasa kebangsaan anak-anak dan pemuda. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa. Sebelum menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran

¹ Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 371

⁴ Ary H Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, hlm. 36

dan Kebudayaan RI, Sarmidi mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.

Kebijakan Sarmidi saat menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran tidak hanya meresmikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 akan tetapi Sarmidi juga mengeluarkan Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 120/A Tahun 1949 tentang Pemberantasa Buta Huruf (PBH) dan Peraturan Pemerintah nomer 37 tahun 1950 tentang Universitas Gajah Mada yang isinya mengenai "Statuta Universitas Gajah Mada serta masih banyak kebijakan lainnya.

II. Metode Penelitian

Sejarah Dalam sebuah penulisan karya sejarah, seorang peneliti pasti menggunakan suatu metode yang ada untuk meneliti suatu peristiwa sejarah, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian menjadi ilmiah, kritis, objektif dan sistematis. Dengan menggunakan suatu metode penelitian kita dapat mengenal cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode penelitian sejarah melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pemilihan topik

Tahapan pertama yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Pemilihan topik

dilakukan untuk memfokuskan sebuah penelitian pada sumber-sumber yang diteliti, selain itu tahapan ini dapat mempermudah peneliti dalam pencarian sumber. Menurut Kuntowijoyo, pemilihan topik didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Seorang peneliti pasti melewati tahap ini untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dengan penelitian. Tahap ini tidak bisa dikatakan sebagai tahap yang mudah karena tidak semua objek penelitian memiliki ketersediaan sumber yang terjangkau dan memiliki kondisi yang baik. Bentuk sumber-sumber penelitian dapat berupa sumber tertulis seperti buku, majalah dan arsip. Selain itu juga dapat berbentuk tidak tertulis seperti benda peninggalan sejarah, foto, dan audiovisual.

Menurut sifatnya sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen, arsip, naskah perjanjian dan benda. Sumber primer merupakan sumber yang sejaman dan berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber merupakan kegiatan menganalisis suatu sumber yang sudah didapatkan untuk menentukan keaslian sumber tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua sumber yang didapatkan bisa digunakan, maksudnya tidak semua sumber itu benar atau asli. Maka setiap sumber yang didapatkan harus diuji kebenarannya. Terdapat dua macam kritik sumber yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian sejarah, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

d. Interpretasi

Tahapan ke empat dalam penulisan sejarah adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran dari data-data yang diperoleh, untuk mendapatkan suatu kesimpulan baru yang didukung oleh sumber-sumber dan pendekatan yang digunakan. Dalam tahap ini, dilakukan penyuntingan sumber-sumber melalui analisis dan sintesis. Analisis berarti data atau sumber yang kita peroleh harus kita uraikan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan.

e. Historiografi

Tahap terakhir dalam penulisan sejarah adalah historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah disajikan dalam

bentuk tulisan. Didalamnya terkandung isi dari karya tulis yang disajikan dari tahap-tahap yang telah dilalui sebelumnya.

III. Pembahasan

1. Pendidikan di Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi negara yang belum stabil. Hal tersebut juga ikut mempengaruhi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kementerian PP dan K. Kementerian Pendidikan dinilai belum mampu membuat pendidikan di Indonesia berjalan efektif, walaupun pendiriannya sudah dibentuk pada awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 tetapi pembangunan pendidikan belumlah optimal yang salah satu faktornya adalah seringnya berganti menteri seiring dengan bergantinya kabinet.⁵

Pada masa awal kemerdekaan pula telah disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh

⁵ Helius Sjamsuddin, dkk, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 8.

karenanya sudah tentu bahwa dasar pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila. Pendidikan Pancasila ini dirasa sangat tepat untuk membangun kualitas manusia Indonesia karena sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.⁶ Sementara itu, tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan ialah untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat.⁷

Kurikulum pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan baru mulai muncul pada tahun 1947 yang disebut *leer plan*.⁸ Pada tahun 1950, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat (1) yang berbunyi bahwa: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.⁹ Terdapat tiga tingkat atau jenjang pendidikan dalam sistem persekolahan di Indonesia, yaitu

Pendidikan Rendah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak yang ditempuh selama setahun dan Sekolah Dasar enam tahun. Tingkat selanjutnya adalah Pendidikan Menengah yang terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan masa belajar untuk masing-masing tingkatan yakni tiga tahun. Tingkatan yang terakhir adalah Pendidikan Tinggi yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki.¹⁰

2. Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Menteri Sarmidi Mangunsarkoro (1949-1950)

Kebijakan-kebijakan yang diambil Sarmidi saat ia menjabat sebagai Menteri PP dan K didasarkan atas realitas yang ada di masyarakat. Sejak zaman penjajahan Belanda, para pemimpin pergerakan rakyat telah menyadari bahwa keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan oleh banyaknya rakyat yang masih buta huruf.¹¹ Dengan latar belakang dan pengalamannya di dunia pendidikan, Sarmidi pasti sudah mengerti ia harus mengambil kebijakan pendidikan seperti apa ditengah pembangunan negara yang sedang di galangkan pemerintah. Saat ia menjabat angka buta huruf masyarakat masih sangat tinggi untuk itu ia mengeluarkan kebijakan

⁶ *Ibid.* hlm. 2-3.

⁷ Wardiman Djojonegoro, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁸ Adriono, dkk, *Jejak Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011)*, hlm. 22.

⁹ Ary. H Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 37.

¹¹ *Ibid.* hlm. 59.

Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dengan mengadakan kursus-kursus PBH.

Sarmidi juga mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta dengan tujuan untuk menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dan mendidik pelajar menjadi warga negara yang berkebudayaan tinggi. Pendirian ASRI ini pun sejalan dengan pembangunan negara dalam sektor kebudayaan atau kultur karena pada tingkat pendidikan tinggi pengetahuan manusia dikembangkan sampai pada batas sistematika yang ada pada zamannya. Pengetahuan atau ilmu yang dikembangkan di ASRI sangat beragam dan pasti akan berdampak terhadap bidang lain.¹² Karena ilmu pengetahuan yang diperoleh diperguruan tinggi merupakan alat untuk keperluan pembangunan nasional.

Tak hanya itu Sarmidi pun memberikan penghargaan terhadap para pelajar yang telah ikut berjuang dalam masa perang kemerdekaan antara tahun 1945-1950. Para pelajar senantiasa siap menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan seperti pada masa Kebangkitan Nasional di mana mereka telah berperan sebagai penggerak semangat persatuan dan kebangsaan, sedangkan pada masa revolusi mereka pun tidak ketinggalan untuk ikut

memanggul senjata. Jelas bahwa peranan para pelajar dan mahasiswa di Indonesia selama periode tahun 1945-1950 merupakan salah satu unsur perjuangan bangsa yang mewakili lembaga kependidikan.

Berikut Ini adalah beberapa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 1949-1950.

- a. Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dan Kursusu Lanjutan PBH
- b. Penetapan Kalender Akademik
- c. Pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta
- d. Penghargaan Terhadap Para Pelajar Pejuang Revolusi
- e. Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan Nasional
- f. Sistem Universitas Gajah Mada
- g. Dan kebijakan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada saat Sarmidi menjabat dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat mendasar bagi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut justru sangat penting. Dengan memberikan dasaran yang kuat maka pembangunan pendidikan di Indonesia dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sehingga pendidikan di Indonesia nantinya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

¹² *Ibid.* hlm. 25.

3. Dampak Dari Kebijakan yang Dikeluarkan Oleh Sarmidi Mangunsarkoro

Dalam konteks hidup bernegara, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti akan memiliki dampak. Dampak tersebut tidaklah hanya dirasakan oleh sektor dari kebijakan yang dikeluarkan tetapi juga berdampak terhadap sektor lainnya. Seperti halnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan pasti akan berdampak pada sektor kehidupan masyarakat lainnya. Tidak bisa dipungkiri lagi jika kita ingin membangun sebuah negara hal yang utama adalah membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu, karena akan percuma ketika membangun segala sektor kehidupan tetapi masyarakat tidak bisa merawat atau mengelolanya. Ketika pendidikan mulai diperhatikan dan dibenahi maka lambat laun pasti SDMnya akan lebih terampil lagi karena dampak dari kualitas pendidikan tersebut. Dampak dari SDM yang berkualitas akan membawa sebuah negara menjadi negara yang mandiri atau bahkan bisa membuat negara itu maju.

Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Sarmidi dapat diklasifikasikan kedalam dampak sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Dalam bidang sosial dapat kita lihat pada Tujuan pendidikan dan pengajaran negara

Indonesia dalam UU No. 4 tahun 1950 pada Bab II pasal 3 berbunyi : “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.¹³ Kalau kita melihat bahwa cita-cita bangsa Indonesia sudah terkandung lengkap dalam pancasila, maka dapat kita katakan susila adalah sesuai dengan pancasila. Walaupun pada dasarnya sikap atau perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh lingkungan pendidikannya tetapi dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk menciptakan manusia Indonesia yang berjiwa pancasila.

Dalam bidang budaya Pembangunan ASRI atau yang sekarang dikenal dengan ISI (Institut Seni Indonesia) di Yogyakarta tentunya membawa dampak yang sangat besar dibidang budaya. Masyarakat diberikan wadah untuk mengembangkan kemampuannya di bidang seni yang secara otomatis akan melestarikan budaya itu sendiri. Selain itu saat ini ISI merupakan perguruan tinggi negeri yang pada saat ini cukup banyak peminatnya. ISI tentunya telah mencetak banyak seniman yang terampil misalnya adalah GM Sudarta

¹³ Dalam lampiran. Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, (Malang: Usaha Nasional, 1983), hlm. 169.

yang mahir dalam bidang kartunis (karikatur). Ia merupakan alumni ASRI angkatan 1965.¹⁴

Dalam bidang ekonomi dengan keluarkannya kebijakan menaikkan uang honorarium untuk guru-guru, walaupun jumlah sebelumnya yang telah ditentukan pada Putusan Menteri PP dan K pada tanggal 17 November 1949 tidak bisa penulis sertakan karena keterbatasan sumber dan ketersediaan arsip tetapi melihat putusan No. 426/C pada bagian menimbang telah disebutkan bahwa jumlah maksimum uang honorarium guru-guru tidak tetap perlu dinaikan agar pemberian pembelajaran untuk tiap-tiap mata pelajaran sebanyak mungkin di pegang oleh seorang tenaga pengajar.¹⁵ Dengan keluarnya putusan tersebut berarti pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan guru yang mana akan mengangkat kondisi ekonomi guru tersebut.

Dalam bidang politik merujuk pada tujuan pendidikan yang telah disebutkan diawal bahwasanya salah satu tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan adalah menciptakan warga negara yang demokratis. Demokratis itu sendiri

merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik, berarti tujuan pendidikan yang dicanangkan pemerintah pasti akan berdampak pada kehidupan berpolitik dalam sebuah negara. Tujuan pendidikan yang tertuang pada UU No. 4 Tahun 1950 tersebut juga dimaksudkan untuk menciptakan SDM yang cakap, manusia yang cakap hanya dapat diperoleh dengan suatu usaha yang teratur dan sistematis dan dengan mengingat bahwa ia juga dinilai sebagai warga negara. Maka secara langsung kita menyinggung tugas kewajiban daripada negara dan pemerintah.

Dalam bidang pendidikan Pada tahun 1949 Sarmidi mengeluarkan kebijakan PBH yang mana pada tahun 1951 program tersebut selanjutnya dibuat sebagai rencana 10 tahun Pendidikan masyarakat. Dalam rencana ini terdapat tugas untuk mengadakan PBH dengan rencana menghabiskan buta huruf di Indonesia dalam waktu 10 tahun. Namun pada kenyataannya cita-cita ini tidak tercapai dilihat dari hasil sensus tahun 1971 yang menunjukkan bahwa jumlah buta huruf di Indonesia masih mencapai 32, 21 juta atau kurang lebih 40% masyarakat Indonesia masih mengalami buta huruf. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor Pada dasarnya walaupun program ini jauh dari kata tercapai bahkan sampai pada saat ini tetapi kebijakan Sarmidi tetaplah

¹⁴ <https://isiyogyakarta.wordpress.com/profil-alumni-isi-yogyakarta/> diakses pada 25

Juli 2018 pukul 17.21 WIB

¹⁵ Putusan Menteri PP dan K pada tanggal 23 Januari 1950 No. 426/C.

membawa dampak yang baik bagi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini terus dilanjutkan dari masa ke masa walaupun dengan nama yang berbeda tetapi tujuannya tetap sama yaitu mengurangi angka buta huruf di Indonesia.

Selain itu dari keluarnya UU No. 4 Tahun 1950 yaitu terdapat beberapa jenis pendidikan dan kegiatan yang ada di Indonesia yaitu (1) Pendidikan Jasmani, (2) Pendidikan Orang dewasa, (3) Pendidikan Luar Biasa, (4) Pendidikan guru, (5) Pendidikan Kejuruan, (6) Pendidikan wanita, (7) Pendidikan agama, (8) Pendidikan Tinggi, (9) Pendidikan Swasta, (10) Organisasi Orang Tua Murid dan Guru, (11) Organisasi Guru, Pelajar dan Mahasiswa.¹⁶

IV. Kesimpulan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi negara yang belum stabil. Hal tersebut juga ikut mempengaruhi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kementerian PP dan K.

Pada masa awal kemerdekaan pula telah disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karenanya sudah tentu bahwa dasar

pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila. Pendidikan Pancasila ini dirasa sangat tepat untuk membangun kualitas manusia Indonesia karena sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan ialah untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat.

Kurikulum pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan baru mulai muncul pada tahun 1947 yang disebut *leer plan*. Pada tahun 1950, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 1950. Sistem persekolahan pada masa awal kemerdekaan mengalami penyesuaian agar setiap warga Negara mampu mengenyam pendidikan.

Dalam masa jabatannya selama menjadi menteri PP dan K, Sarmidi Mangunsarkoro banyak mengeluarkan kebijakan antara lain Dalam masa jabatannya selama menjadi menteri PP dan K, Sarmidi Mangunsarkoro banyak mengeluarkan kebijakan antara lain program Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus lanjutan PBH, Penetapan kalender akademik, Pendirian ASRI, Penghargaan terhadap para pelajar pejuang revolusi, Undang-undang no. 4

¹⁶ Helius Sjamjudin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 58-70.

tahun 1950, Sistem Universitas Gajah Mada dan kebijakan lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sarmidi Mangunsarkoro memberikan berbagai dampak. Dampak-dampak tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dampak sosial budaya, ekonomi, politik dan pendidikan.

V. Daftar Pustaka

a. Buku:

Adriono, dkk. (2011). *Jejak Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ary H. Gunawan.(1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

H.A.R, Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 1995). hlm. 72

Hasbullah.(2009). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Helius Syamsudin dan Ismuan.(1996). *Metode Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jurusan Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi: Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: FIS UNY.

Kuntowijoyo.(2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (2011). *Riwayat Singkat Ki Sarmidi Mangunsarkoro*.Yogyakarta.Lampiran pengajuan gelar pahlawan nasional kepada Kementerian Sosial RI.

Redja Mudyahardjo. (2012). *Pengantar Pendidikan*.Jakarta: Raja Grafindo persada.

Soegarda Poerbakawatja. (1970). *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.

Sumarsono Mestoko, dkk. (1998). *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tilaar, H.A.R. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.

Wardiman Djojonegoro. (1996). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wasty Soemanto. (1983). *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Malang: Usaha Nasional.

Arsip:

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 3 September 1949 No. 120/A.

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 24 November 1949 No. 428/A.

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 21 Oktober 1949 No. 188/B

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 15 Desember 1949 No. 32/Kebud.

Peraturan pemerintah No 32 Tahun 1949

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 10 Oktober 1948

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 31 Oktober 1948

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 24 November 1949 No 425/A

Surat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 24 November 1949 No 313/B

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 30 November 1950 No. 456/A

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 23 Januari 1950 No. 426/C

Surat edaran Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada Tanggal 10 Mei 1950.

Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 15 Agustus 1950.

Internet:

[Http://www.kbbi.web.id/dasar](http://www.kbbi.web.id/dasar) diakses pada 14 Juli 2018 pukul 9.28 wib

Reviewer,



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19740809200812100

Pembimbing,



Dr. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 197706182003122001